

 PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG	NOMOR SOP	:	477.6 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	:	2025
	TANGGAL EFEKTIF	:	2025 S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS 3AP2KB
	NAMA SOP	:	 Dr. TI HAR, SE. M. Si PEMBINA TINGKAT I/ IV.b NIP.197306052001121005
		:	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KUALIFIKASI PELAKSANA			
	MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN		
1	INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL		
2	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH		
3	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH		
4	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER		
5	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG		
6	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
7	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		

8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. DAFTAR HADIR PESERTA
		2. DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA KEGIATAN
		3. TANDA TERIMA PEMBERIAN HONORARIUM
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA PEMBINAAN DALAM MENJALANKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		
2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		

	PEMERINTAH KOTA TANGERANG				NOMOR				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN				NO. REVISI/TERBITAN				
	SOP PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				TANGGAL BERLAKU				
	KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				HALAMAN				
		PELAKSANAAN						KETERANGAN	
NO	PROSES	KETUA TIM KERJA	KABID	KADIS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	MENGUSULKAN TIM PEMBINAAN							3 JAM DRAFT SK TIM PEMBINAAN	
2	MENGAJUKAN USULAN TIM KEPADA KEPALA DINAS							3 JAM SK TIM PEMBINAAN	
3	MENETAPKAN TIM MELALUI SURAT KEPUTUSAN							3 JAM SK TIM PEMBINAAN	
4	MENYAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPADA BIDANG							2 JAM SK TIM PEMBINAAN	
5	MEMPERSIAPKAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN PEMBINAAN							4 JAM JADWAL DAN LOKASI PEMBINAAN	
6	MENUGASKAN UNTUK MEMROSES PENYELENGGARAAN PEMBINAAN							3 JAM DISPOSISI	
7	MEMROSES PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN							4 JAM DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	
8	MEMBUAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN							8 JAM DRAFT DOKUMEN ADMINISTRASI	
9	MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN							3 JAM DOKUMEN ADMINISTRASI	
10	MEMERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI							3 JAM DOKUMEN ADMINISTRASI	
11	MENETAPKAN DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI							3 JAM DOKUMEN ADMINISTRASI	
12	MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN							4 JAM PELAKSANAAN PEMBINAAN, LAPORAN	
						JUMLAH		43 JAM	